

Kartu soal TKA

- Jenjang Sekolah : SMA
- Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila
- Kelas/ Fase : XII/ F
- Materi : Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945.
- Tujuan pembelajaran : Menganalisis tugas, fungsi, dan wewenang MA, MK, dan KY sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
- Indikator: Mengevaluasi pernyataan terkait lembaga yudikatif.
- Level kognitif : C4 (Menganalisis)
- Bentuk Soal : Benar/ Salah

SOAL

1. Analisislah kebenaran pernyataan berikut mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

A. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia.

Benar/ Salah

B. Komisi Yudisial berwenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum.

Benar/ Salah

C. Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden.

Benar/ Salah

2. Dalam suatu negara, pemerintah menyusun kebijakan pembangunan nasional dengan menjadikan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai pertimbangan utama. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan manfaat pembangunan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara paling tepat ditunjukkan oleh pernyataan bahwa Pancasila

- A. menjadi simbol identitas bangsa yang digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan
- B. menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
- C. menjadi pedoman moral pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah
- D. menjadi pandangan hidup yang hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat
- E. menjadi dokumen sejarah yang menjadi bukti terbentuknya negara Indonesia

KARTU SOAL TKA

Jenjang Sekolah	: SMA
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila
Kelas/Fase	: XII/F
Materi	: Peran lembaga penegak hukum
Tujuan Pembelajaran	: Memahami peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
Indikator Soal	: Peserta didik dapat mengidentifikasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang.
Level Kognitif	: C2 (Memahami)
Bentuk Soal	: Pilihan Ganda
Nomor soal	: 1

Soal

Perhatikan pernyataan berikut!

1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang termasuk salah satu tugas pokok Polri adalah
 - A. mengadili pelaku tindak pidana
 - B. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - C. membuat undang-undang
 - D. memberikan grasi kepada narapidana
 - E. menetapkan putusan pengadilan

Kunci Jawaban: B

Penjelasan: Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

KARTU SOAL TKA

Komponen	Keterangan
Mata Pelajaran	Pendidikan Pancasila / PPKn
Fase / Kelas	Fase F / Kelas 12
Tujuan Pembelajaran	Evaluasi peran dan harmonisasi lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat.
Materi	Pelindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Indikator Soal	Disajikan kutipan berita mengenai tindak pidana korupsi lintas sektoral, peserta didik dapat memilih beberapa pernyataan benar yang menunjukkan batas kewenangan serta sinergi KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Level Kognitif	L3 / C5 (Evaluasi - HOTS)
Bentuk Soal	Pilihan Ganda Kompleks (PGK - Opsi Jawaban Lebih dari Satu)

Perhatikan Pernyataan berikut !

Kasus dugaan penyelewengan dana hibah pemulihan ekonomi senilai puluhan miliar rupiah di tingkat daerah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyelidikan awal dimulai oleh Penyidik Kepolisian Daerah (Polda). Namun, karena kasus ini melibatkan kepala daerah dan oknum aparat hukum lokal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan fungsi koordinasi dan supervisi, hingga akhirnya mengambil alih penyidikan. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan di Pengadilan Tipikor.

Soal:

Berdasarkan wacana di atas dan ketentuan perundang-undangan penegakan hukum di Indonesia, tentukanlah **pernyataan-pernyataan yang BENAR!** (*Jawaban benar lebih dari satu*)

A. Kejaksaan Republik Indonesia memegang monopoli peran penuntutan (*dominus litis*) untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor.

B. Kepolisian memiliki kewenangan absolut dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun dalam penanganan kasus korupsi sejak tahap awal.

C. KPK berwenang mengambil alih penyidikan dari Kepolisian apabila penanganan perkara memenuhi kriteria seperti melibatkan aparat penegak hukum atau bernilai kekhawatiran publik.

D. BPK bertindak sebagai lembaga peradilan yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyelewengan dana.

E. Penanganan kasus korupsi membutuhkan sinergi antarlembaga (*integrated criminal justice system*) demi menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kunci Jawaban & Penjelasan:

- **Kunci Jawaban: A, C, dan E**

- **Penjelasan:**

- **Pernyataan A (BENAR):** Kejaksaan merupakan penuntut umum tunggal (*dominus litis*) dalam tata hukum Indonesia.
- **Pernyataan B (SALAH):** Kepolisian tidak bersifat absolut; UU KPK memberikan wewenang supervisi dan pengambilalihan perkara korupsi (*take-over power*).
- **Pernyataan C (BENAR):** Sesuai UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dari Kepolisian/Kejaksaan berdasarkan alasan terukur (misal: melibatkan aparat penegak hukum/penyelenggara negara).
- **Pernyataan D (SALAH):** BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan (auditor negara), bukan lembaga peradilan yang menentukan sanksi pidana.
- **Pernyataan E (BENAR):** Kerja sama *integrated* antarlembaga penegak hukum sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum korupsi.

KARTU SOAL TKA

Jenjang Sekolah	SMA
Mata Pelajaran	Pendidikan Pancasila
Fase/Kelas	F / XII
Elemen	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Indikator Soal	Disajikan wacana tentang kasus pelanggaran hak, peserta didik dapat menganalisis faktor internal penyebab terjadinya kasus tersebut.
Level Kognitif	C4 (Menganalisis)
Bentuk Soal	Pilihan Ganda
Nomor Soal	1

Soal

Perhatikan wacana berikut!

Seorang siswa menyebarkan foto temannya melalui media sosial disertai komentar yang menghina tanpa meminta izin. Akibatnya, korban merasa malu, mengalami tekanan psikologis, dan enggan mengikuti kegiatan di sekolah. Setelah ditelusuri, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut karena ingin mendapatkan perhatian dan merasa tindakannya hanya sebagai hiburan.

Berdasarkan wacana tersebut, **faktor internal** yang paling tepat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak tersebut adalah

- A. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap penggunaan media sosial.
- B. Rendahnya kesadaran pelaku terhadap hak orang lain serta lemahnya pengendalian diri.
- C. Kemudahan akses teknologi informasi yang dimiliki masyarakat.
- D. Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai etika bermedia digital.
- E. Pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak memberikan teladan yang baik.

Kunci Jawaban

B. Rendahnya kesadaran pelaku terhadap hak orang lain serta lemahnya pengendalian diri.

Pembahasan

Faktor **internal** adalah penyebab yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya moral, kurangnya empati, atau lemahnya pengendalian diri. Pada kasus tersebut, pelaku melakukan tindakan karena ingin memperoleh perhatian dan menganggap perbuatannya sebagai hiburan. Hal ini menunjukkan adanya **rendahnya kesadaran menghormati hak orang lain serta lemahnya pengendalian diri**, sehingga jawaban yang tepat adalah **B**.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 10 dengan materi Berbangsa dan Bernegara dirancang untuk menguji pemahaman mendalam mengenai hakikat bangsa, negara, serta unsur-unsur pembentuknya.

Berikut adalah kartu soal beserta butir soal pilihan ganda dan kunci jawabannya.

KARTU SOAL 1 (Pilihan Ganda)

- * Jenis Sekolah: SMA / MA
- * Mata Pelajaran: PPKn
- * Kelas / Semester: X (Sepuluh) / Ganjil
- * Kurikulum: Kurikulum Merdeka / K-13
- * Materi: Hakikat Bangsa dan Negara
- * Indikator Soal: Disajikan ilustrasi mengenai sekelompok orang yang memiliki kesamaan latar belakang sejarah dan cita-cita, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur terbentuknya bangsa dengan tepat.
- * Level Kognitif: L3 (Penalaran / Analisis)

Butir Soal 1

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Meskipun memiliki perbedaan yang tajam, mereka dipersatukan oleh perasaan senasib penanggungan akibat penjajahan di masa lalu serta memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan ilustrasi tersebut, unsur terpenting yang mendasari terbentuknya bangsa Indonesia menurut Ernest Renan adalah...

- A. Adanya kesamaan wilayah geografis tempat tinggal.
- B. Adanya kehendak untuk bersatu (desir d'etre ensemble).
- C. Persamaan bahasa tata cara adat istiadat.
- D. Keberadaan komunitas religius yang mendominasi.
- E. Kesamaan keturunan dan ikatan darah yang murni.

* Kunci Jawaban: B

* Penjelasan: Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya jiwa, asas spiritual, dan kehendak untuk hidup bersama (desir d'etre ensemble) yang lahir dari perasaan senasib dalam sejarah dan cita-cita masa depan, bukan sekadar faktor geografis atau darah.

KARTU SOAL 2 (Pilihan Ganda)

- * Jenis Sekolah: SMA / MA
- * Mata Pelajaran: PPKn
- * Kelas / Semester: X (Sepuluh) / Ganjil
- * Kurikulum: Kurikulum Merdeka / K-13
- * Materi: Unsur-Unsur Terbentuknya Negara
- * Indikator Soal: Peserta didik dapat membedakan antara unsur konstitutif dan unsur deklaratif dalam proses terbentuknya suatu negara.
- * Level Kognitif: L2 (Aplikasi / Pemahaman)

Butir Soal 2

Dalam hukum internasional, agar suatu entitas dapat disebut sebagai negara yang sah dan mandiri, ia harus memenuhi dua jenis unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Di bawah ini yang merupakan unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah...

- A. Hubungan diplomatik, konstitusi, dan dasar negara.
- B. Pengakuan de jure, lagu kebangsaan, dan bendera.
- C. Rakyat, wilayah yang pasti, dan pemerintah yang berdaulat.
- D. Pengakuan de facto, undang-undang, dan tentara nasional.
- E. Sistem ekonomi, batas wilayah, dan ideologi negara.

* Kunci Jawaban: C

* Penjelasan: Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus ada saat negara didirikan, meliputi rakyat, wilayah yang tetap/pasti, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pengakuan dari negara lain bersifat deklaratif (tambahan).

KARTU SOAL 3 (Pilihan Ganda)

* Jenis Sekolah: SMA / MA

* Mata Pelajaran: PPKn

* Kelas / Semester: X (Sepuluh) / Ganjil

* Kurikulum: Kurikulum Merdeka / K-13

* Materi: Fungsi dan Tujuan Negara

* Indikator Soal: Disajikan fungsi-fungsi negara secara umum, peserta didik dapat menganalisis implementasi fungsi pertahanan dalam kehidupan bernegara.

* Level Kognitif: L3 (Analisis)

Butir Soal 3

Setiap negara di dunia wajib menjalankan fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Tindakan berikut yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pertahanan negara oleh warga negara biasa dalam kehidupan sehari-hari adalah...

- A. Membeli senjata api untuk melindungi diri dari kejahatan jalanan.
- B. Mengikuti demonstrasi anarkis untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
- C. Menggunakan produk luar negeri secara berlebihan demi gengsi sosial.
- D. Menjaga kelestarian budaya daerah dan menyaring informasi hoaks yang memecah belah.
- E. Menyerahkan seluruh urusan keamanan lingkungan kepada aparat TNI semata.

* Kunci Jawaban: D

* Penjelasan: Fungsi pertahanan dalam konteks modern dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) melibatkan warga negara melalui cara non-militer, seperti menjaga integrasi bangsa, melestarikan budaya, dan menangkal hoaks yang mengancam persatuan.

